



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERENCANAAN STRATEGIK (RENSTRA)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan program penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan dalam kurun waktu 5 tahun merupakan rujukan untuk menyusun Repetada, RAPBD, dan Laporan Pertanggung Jawaban, dipandang perlu menetapkan Perencanaan Strategik (Renstra) Kabupaten Jemberana Tahun 2001 – 2005.
 - c. bahwa Perencanaan Strategik (Renstra) dimaksud huruf b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 27 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas / Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 29 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERENCANAAN STRATEGIK (RENSTRA) KABUPATEN JEMBRANA 2001 - 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perencanaan Strategik yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten.

Pasal 2

Kedudukan Perencanaan Strategik pada tata urutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana adalah sebagai Dokumen Taktis Strategis

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 3

Perencanaan Strategik (Renstra) Kabupaten Jembrana Tahun 2001 - 2005 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

BAB III : VISI, MISI DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

BAB IV : PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : P E N U T U P.

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian dimaksud pasal 3, diuraikan dalam naskah Perencanaan Strategik (Renstra) Kabupaten Jembrana Tahun 2001 - 2005 terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, disusun program dan kegiatan setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Kebijakan, program dan kegiatan dalam Renstra ini mencakup Tahun 2001, walaupun ditetapkan pada Tahun 2002.

**BAB IV
P E N U T U P**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara

Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 44

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERENCANAAN STRATEGIK (RENSTRA)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 - 2005**

I. PENJELASAN UMUM

Merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menetapkan Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Jembrana yang memuat pokok - pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana. Perencanaan Strategik (Renstra) ini adalah dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Renstra ini ditetapkan dengan memperhitungkan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Sebagai sebuah dokumen taktis strategis, Renstra ditetapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jembrana serta disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Pola Dasar Kabupaten Jembrana tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Renstra Kabupaten Jembrana merupakan induk Renstra Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor sehingga bersifat umum. Penjabaran lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat Renstra masing –

masing Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor yang program dan kegiatannya bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Renstra Kabupaten Jembrana telah ada pada Tahun 2001 dan dipakai acuan oleh Sekretariat Daerah, Badan, Dinas dan kantor dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan mulai Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Memperhatikan kegiatan DPRD Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat padat sehingga pembahasan dan penetapan Ranperda Renstra menjadi Peraturan Daerah Renstra, dapat dilaksanakan pada Tahun 2002 ini.

Pasa 7 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2002

**TENTANG : PERENCANAAN STRATEGIK KABUPATEN
JEMBRANA 2001 - 2005**

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Landasan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK	6
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Jembrana	6
2.2 Analisis Lingkungan Strategik	7
BAB III VISI, MISI DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	19
3.1 Visi	19
3.2 Misi	20
3.3 Faktor Penentu Keberhasilan	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1 Pengertian Tujuan	26
4.2 Pengertian Sasaran	26
BAB V CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	32
5.1 Kebijakan	32
5.2 Program	32
5.3 Kegiatan	32
BAB VI PENUTUP	34
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

" OM SWASTI ASTU "

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sanghyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugrahaNya maka Perencanaan Strategik Kabupaten Jembrana dapat disusun dalam waktu relatif singkat. Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat masalah - masalah yang esensial (sangat penting) bagi pembangunan Kabupaten Jembrana.

Penyusunan renstra merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sistem pemerintahan yang mengalami perubahan - perubahan cepat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Perubahan - perubahan tersebut mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparat baik di Sekretariat, Badan, Dinas maupun Kantor. Agar sistem akuntabilitas ini dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya Perencanaan Strategik Kabupaten Jembrana Tahun 2001 - 2005.

Selaras dengan semangat Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berkaitan dengan Otonomi Daerah serta Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, maka penyusunan Perencanaan Strategik Kabupaten Jembrana merupakan suatu mekanisme konstitusi ketatanegaraan.

Dengan berhasilnya penyusunan Perencanaan Strategik Kabupaten Jembrana ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen ini. Mudah - mudahan sumbangan pemikiran saudara - saudara sekalian mendapatkan imbalan sesuai dengan pengabdian yang telah dilaksanakan.

Terima kasih.

" OM SANTHI SANTHI SANTHI OM "

Negara, 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,

ttd.

I GEDE WINASA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dinamika dan perkembangan sistem Pemerintahan mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Paradigma yang banyak muncul sebagai proses demokratisasi dan transparansi pada semua bidang kehidupan.

Dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka setiap pengelola pemerintah utamanya Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik (Renstra).

Bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana penyusunan dokumen Renstra wajib dilaksanakan berdasarkan PP No. 108 / 2000. Dalam PP No. 108 / 2000 tersebut menyatakan bahwa Renstra Daerah berfungsi sebagai Perencanaan Taktis Strategik, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda serta indikator – indikator penunjangnya.

Dengan semangat Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dipandang perlu menetapkan Renstra Kabupaten Jembrana.

Renstra sangat berguna sebagai rujukan dalam penyusunan Repetada, RAPBD dan juga sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD. Substansi dan muatan Renstra Kabupaten dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD saja. Renstra Kabupaten Jembrana merupakan induk dari Renstra – renstra Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor. Sebagai Renstra induk, maka Renstra Kabupaten Jembrana lebih bersifat umum. Renstra Kabupaten Jembrana merupakan Rumusan Perencanaan

Taktis Strategik Kabupaten Jembrana selama lima tahun. Uraian terinci dari Renstra Kabupaten Jembrana terdapat pada Renstra – renstra : Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor.

Pembuatan Renstra ini sangat penting, disamping sebagai Dokumen Perencanaan Taktis Strategis, Renstra ini memberi arah dan menuntun pelaksanaan dan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan Visi dan Misi Jembrana.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka penyusunan Renstra difokuskan pada hal-hal strategis, terukur dan terkendali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Renstra Kabupaten Jembrana merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan baik di Kabupaten maupun Kecamatan melalui lintas sektoral. Renstra Kabupaten Jembrana sebagai landasan Perencanaan Strategik Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor sehingga pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat betul – betul bertumpu kepada demokratisasi, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum serta berlandaskan pada *semangat mekepong* untuk menjadi yang terbaik.

Tujuan disusunnya Renstra :

1. Untuk memberi arah pembangunan di Kabupaten Jembrana.
2. Sebagai landasan penyusunan Repetada, RAPBD.
3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja Sekretariat, Badan Dinas dan Kantor.
4. Sebagai acuan bahan penyusunan pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD.

Sasaran penyusunan Renstra adalah kegiatan strategik baik lingkup Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Sasaran ini berupa program pembangunan tertuang dalam perencanaan strategik yang berlangsung pada kurun waktu lima tahun.

1.3. Landasan

Renstra Kabupaten Jembrana adalah rencana strategik Kabupaten berupa dokumen perencanaan taktis strategik, yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dan Keputusan Bupati Jembrana No. 540 Tahun 2000 tentang Propeda serta indikator – indikator penunjang lainnya.

Renstra Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila
- (2). Landasan Konstitusional yaitu U.U.D 1945
- (3). Landasan Operasional :
 - Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
 - Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
 - Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Surat Keputusan LAN No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 050/1240/II/Bangda, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 – 2005.
- Keputusan Bupati Jembrana No. 540 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan tentang Masalah Umum, Tujuan, Sasaran dan Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK, menguraikan tentang Gambaran Kabupaten Jembrana secara umum, Analisis Lingkungan Strategik baik internal maupun eksternal.

BAB III : VISI, MISI DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN, menguraikan tentang Rumusan Visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Jembrana dimasa depan. Untuk mewujudkan Visi Jembrana ditetapkan enam buah misi. Faktor penentu keberhasilan berisikan tentang dua belas faktor penentu perencanaan strategik.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang Penetapan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

BAB V : CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategik selama lima tahun.

BAB VI : PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Kabupaten dari 9 Kabupaten / Kota di Propinsi Bali yang letaknya di ujung barat sehingga sekaligus sebagai pintu masuk ke Pulau Bali sebelah barat dengan luas wilayah 84180 Ha (841,80 Km²) atau 14,94 % dari luas Propinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Jembrana berada pada posisi antara 8⁰ 09'30 – 8⁰ 28'02" lintang selatan dan 114⁰ 25'33" – 114⁰ 56'38" bujur timur dengan garis pantai sepanjang 76 Km.

Secara administratif Kabupaten Jembrana terdiri atas 4 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 42 Desa, 35 Lingkungan dan 199 Dusun 232 Banjar serta 61 Desa Adat. Jumlah penduduknya sebanyak 232.039 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,03 % dan kepadatan penduduk pada tahun 2000 rata - rata 275 jiwa per Km².

Ditinjau dari segi penggunaan tanah pada tahun 1998 maka Kabupaten Jembrana sebagian besar (49,07%) merupakan kawasan hutan, selanjutnya tanah tegalan 28,42% tanah sawah 11,54%, pemukiman 6,34% dan lain - lain 4,51 %.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Jembrana telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik terbukti dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI rata-rata 6,91% dari target 6,34%. Struktur perekonomian daerah juga menunjukkan kondisi yang semakin berimbang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya peran sektor pertanian dari 31,45% pada tahun pertama Repelita VI menjadi 29,77% pada tahun ketiga Repelita VI. Sebaliknya peranan sektor non pertanian menunjukkan kecendrungan semakin meningkat.

Namun sejak Tahun 1998, krisis moneter menerpa Bangsa Indonesia sehingga laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Dalam kondisi demikian sektor pertanian terpengaruh paling kecil oleh dampak krisis moneter.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka program prioritas pembangunan dikembalikan kepada sektor pertanian dalam arti luas. Dari pola ini dapat diharapkan proyeksi PDRB Jembrana Tahun 2001 - 2005 terus meningkat dan sektor pertanian diproyeksikan memegang kontribusi yang terbesar, sesuai dengan lampiran 1 di belakang.

Selanjutnya dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di satu sisi sedangkan di sisi lain pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan investasi di Kabupaten Jembrana khususnya dari pihak pemerintah selama lima tahun yaitu tahun 1998 – 2001 semakin meningkat.

Dari data Tahun 2001, sampai bulan September 2001 pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai 4,7 M. Hal ini meningkat dibandingkan dengan asumsi APBD 2001 sebesar 4,5 M.

2.2 Analisis Lingkungan Strategik

1. Faktor Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Kabupaten Jembrana yang meliputi kekuatan dan kelemahan.

1.1 Strength (S) / Kekuatan

1.1.1 Kebudayaan Daerah yang dijiwai Agama Hindu

Kebudayaan Jembrana sebagai bagian dari Kebudayaan Bali memiliki identitas yang jelas akar yang kokoh dalam lembaga - lembaga tradisional seperti : Desa Adat, Subak, Banjar dan Sekehe - sekehe. Masyarakat Jembrana berinteraksi secara utuh dalam lingkungan kebudayaan yang dijiwai oleh Agama Hindu. Pembangunan Kabupaten Jembrana diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan budaya.

1.1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Struktur Prekonomian Jembrana

Sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi : Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan / Kelautan serta Kehutanan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Jembrana. Pembangunan pertanian dalam arti luas disamping untuk meningkatkan ketahanan pangan juga berfungsi menunjang pembangunan ekonomi pada sub sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

1.1.3 Sarana Dan Prasarana

Kabupaten Jembrana memiliki sarana prasarana relatif merata baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain - lain.

1.1.4 Keamanan Daerah

Secara umum situasi kondisi keamanan Kabupaten Jembrana cukup kondusif, aman, tertib dan terkendali.

1.1.5 Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terhadap Undang - undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tersebut yang pada pokoknya bertujuan memberdayakan masyarakat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya mengantisipasi dan menyikapi secara arif segala aspirasi yang tumbuh dan berkembang baik dari masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari kalangan perguruan tinggi. Pemerintah dan masyarakat Jembrana sangat menyadari bahwa daya dukung Jembrana menuju pembangunan " Jembrana Sebagai Satu Kesatuan " dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar Daerah Kabupaten dan Kota Budaya, Adat Istiadat, Etnis, Potensi dan Sumber Daya yang tersedia. Dengan demikian untuk memberdayakan masyarakat Jembrana dikaitkan dengan keberadaan Undang - undang Otonomi Daerah diperlukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam

untuk menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan, berbudaya dan berwawasan lingkungan dalam kerangka Jembrana seutuhnya.

1.1.6 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang kondusif, konsisten dan didasarkan pada Legal Formal berupa Peraturan Daerah merupakan kekuatan tersendiri dalam menggarap pembangunan di Kabupaten Jembrana.

1.1.7 Kuantitas SDM

Jumlah penduduk Jembrana sebanyak 232.039 jiwa dengan angkatan kerja 142.500 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 275 jiwa per Km² merupakan kekuatan yang besar dalam menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Jembrana.

1.1.8 Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan sangat memerlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijakan dan paradigma baru pembangunan yang partisipatif. Maju mundurnya pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

1.1.9 Keanekaragaman Hayati dan Keindahan Alam

Kabupaten Jembrana sebagai daerah otonom dan sebagai bagian wilayah Propinsi Bali memiliki sumber daya hayati yang sangat unik. Sebagaimana umumnya potensi yang dimiliki Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana juga menikmati keuntungan dari segi geografis, iklim, angkatan kerja, dan stabilitas politik yang mantap, serta organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan yang sangat bervariasi dari segi keanggotaan dan tujuan - tujuannya. Disamping itu, Jembrana juga memiliki potensi lokal yang sangat khas, seperti alam, budaya, termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan, arsitektur, dan kesenian serta tata kehidupan spiritual, sarana lalu lintas, dan sarana prasarana pariwisata lainnya jarak antar

obyek wisata yang tidak terlalu jauh dan dapat dijangkau dalam waktu yang cukup singkat, serta potensi - potensi lainnya, yang satu sama lain saling tergantung dan saling mempengaruhi dan saling melengkapi.

1.1.10 Kesempatan Kerja dan Berusaha

Dengan berkembangnya perekonomian Jembrana dan sektor pertanian dalam arti luas memegang peranan penting, maka kesempatan kerja dan berusaha semakin terbuka.

1.2. Weaknesses (W) / Kelemahan

1.2.1 Kualitas SDM yang belum merata dan Memadai

Sumber Daya Manusia masih rentan dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif maju, efisien, profesional, dan mempunyai kemampuan kewiraswastaan sehingga mampu mengisusi menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek.

Sebagai akibat krisis ekonomi, terjadi penurunan Index Pembangunan Manusia (IPM) dari ranking 71 pada tahun 1999 menjadi ranking 114 pada tahun 2000 dari 179 Negara.

1.2.2 Masih Adanya Penduduk Miskin

Bertambahnya penduduk miskin sejak terjadinya krisis yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jembrana mengalami lonjakan cukup drastis dan bahkan sampai Tahun 2000 jumlah penduduk miskin pra KS dan KS I mencapai 11.957 KK (Pra KS 7.008 dan KS I 4.949 KK). Kemudian pada Tahun 2001 jumlah penduduk miskin telah mengalami penurunan menjadi Pra KS 6.611 KK dan KS I 4.599 KK (11.210 KK).

1.2.3 Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Kualitas lingkungan di Jembrana masih cukup baik ditunjukkan dengan masih baiknya kualitas udara, air sungai, air pantai. Pemukiman yang kumuh dan pasar ada kecendrungan kualitas lingkungan makin menurun dengan meningkatnya zat - zat pencemar yang dibuang ke lingkungan. Kerusakan yang akan timbul berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan, baik sebagai akibat ulah manusia maupun oleh proses alami itu sendiri antara lain makin meningkatnya erosi pantai.

1.2.4 Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensial

Dengan perbedaan potensi dan kondisi setiap Kabupaten / Kota dapat dilihat antara lain dari adanya perbedaan perkembangan perekonomian, tingkat pendapatan masyarakat, kemampuan menggali sumber pembiayaan pembangunan, penyebaran penduduk antar wilayah dan lain - lain. Hal ini akan mempengaruhi perbedaan persepsi dalam melaksanakan pembangunan.

1.2.5 Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan

Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun oleh kedua - duanya bersama - sama kurang konsisten dan tegas, hal ini disebabkan oleh adanya faham kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

1.2.6 Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum

Lemahnya kesadaran dan penegakan hukum sebagai akibat dari aparaturnya hukum yang kurang bersih dan kurang profesional.

1.2.7 Kurangnya pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja

Tercermin dari pelayanan aparaturnya pemerintah kepada masyarakat dan penyelenggaraan manajemen publik belum optimal, kinerja instansi pemerintah masih rendah.

1.2.8 Lemahnya sistem informasi manajemen (SIM)

Dengan perbedaan perekonomian setiap Kabupaten secara tidak langsung mempengaruhi informasi yang akan diperoleh sehingga akan mengakibatkan terlambatnya melaksanakan pembangunan.

1.2.9 Terbatasnya sumber daya irigasi

Kondisi Jembrana yang memiliki hanya beberapa aliran sungai serta terbatasnya sumber air menyebabkan terbatasnya sumber daya air irigasi.

1.2.10 Masih rendahnya kualitas produk daerah

Produk Daerah Jembrana, terutama produksi pertanian dalam arti luas belum memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk luar daerah.

2. Faktor Eksternal

Analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan.

2.1 Oportunity (O) / Peluang

2.1.1 Berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memungkinkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Meningkatnya peran serta masyarakat akan mewujudkan kemandirian daerah.

2.1.2 Letak Geografis Jembrana yang strategis

Kabupaten Jembrana merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Bali dengan letak geografis pada posisi $8^{\circ} 09' 30''$ - $8^{\circ} 28' 02''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 25' 33''$ - $114^{\circ} 56' 38''$ Bujur Timur dengan garis pantai sepanjang 76 Km dan jarak dari Denpasar

95 Km. Disamping sebagai pintu masuk Jawa - Bali di bagian barat, Kabupaten Jembrana juga merupakan lintasan penghubung Bali Selatan dengan Bali Utara, sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian.

2.1.3 Kerjasama antar daerah dan antar negara

Dengan adanya citra yang baik dan potensi yang besar memberikan peluang bagi Kabupaten Jembrana untuk melakukan kerjasama baik regional maupun internasional.

2.1.4 Adanya kontribusi dari bagian keuntungan BUMN dan BUMD

Dengan adanya BUMN seperti Pelabuhan Gilimanuk dan BUMD seperti Perusahaan Daerah dan lain - lain akan memberikan kontribusi peningkatan PAD yang cukup besar.

2.1.5 Pengembangan potensi pemungutan PAD

Adanya penyerahan beberapa kewenangan / pendelegasian fungsi Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten memberi peluang peningkatan potensi PAD.

2.1.6 Pemanfaatan teknologi yang berkembang

Perkembangan teknologi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi, teknologi dan transportasi.

2.1.7 Terbukanya peluang berinvestasi

Adanya rencana tata ruang Wilayah Kabupaten ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan memberikan jaminan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jembrana.

2.2 Threats (T) / Tantangan

2.2.1 Belum adanya konsistensi antara produk - produk hukum nasional yang ada

Adanya aturan - aturan dari pemerintah yang tidak konsisten sering kali menghambat penyelenggaraan pemerintah.

2.2.2 Adanya pengaruh sosial politik ekonomi nasional dan global

Adanya pengaruh sosial politik ekonomi yang global tidak dapat dihindarkan dan ini bisa menjelma menjadi tantangan bila tidak diantisipasi.

2.2.3 Pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali

Arus informasi global yang sangat pesat dan tidak terkendali akan mempengaruhi perekonomian daerah di mana aturan perdagangan internasional menuntut kualifikasi produk yang tinggi sehingga merupakan hambatan bagi pengusaha kecil yang tidak dapat bersaing di pasar global.

2.2.4 Stabilitas nasional yang belum kondusif

Masih tidak menentunya keadaan politik secara nasional akan berpengaruh terhadap stabilitas harga, tenaga kerja dan perubahan mata pencaharian.

2.2.5 Pengaruh budaya luar

Adanya pengaruh budaya yang global merupakan tantangan yang tinggi apabila tidak diantisipasi dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang pada akhirnya dapat mengubah / mengalahkan budaya daerah.

2.2.6 Terjadinya kerusakan hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan

Masih adanya indikasi perusakan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikhawatirkan dapat merusak lingkungan ekosistem penyangga kehidupan.

2.2.7 Membanjirnya produk dari luar

Membanjirnya produk luar yang berkualitas lebih tinggi merupakan tantangan bagi produk daerah yang kurang mempunyai daya saing.

Memperhatikan faktor eksternal dan internal tersebut di atas selanjutnya diberikan pembobotan masing - masing 100 terhadap SWOT dan memberikan rating.

Bobot masing - masing ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh masing - masing komponen. Rating 4 yang berarti (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (cukup berpengaruh), 1 (kurang berpengaruh).

Untuk menentukan ranking dari masing - masing faktor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi faktor ditentukan dengan hasil kali bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga besar dari atas. Analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal disajikan dalam lampiran 2.

Dengan memilih ranking 1 - 3 dari lingkungan internal dan eksternal dari analisa pada lampiran 2 diasumsikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi kekuatan dan peluang Kabupaten Jembrana berupa :

- Tingkatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian dengan memanfaatkan peluang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi.
- Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan Otonomi Daerah dimanfaatkan mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi.
- Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu tumbuh subur dengan adanya Otonomi Daerah sehingga terciptanya peluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.

b. Minimalisasi terhadap Kelemahan dan Tantangan Kabupaten Jembrana berupa :

- Kualitas SDM yang belum merata dan memadai, dioptimalkan untuk mengantisipasi dari pengaruh sosial politik ekonomi, arus informasi global dan membanjirnya produk dari luar.
- Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan kualitasnya untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik dan ekonomi, pesatnya arus informasi global serta membanjirnya produk dari luar.
- Terbatasnya sumber daya air irigasi yang pemanfaatannya dioptimalkan untuk mengantisipasi pengaruh arus informasi dan membanjirnya produk dari luar.

BAB III

VISI, MISI DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

3.1. VISI

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Perumusan visi Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Mampu menjadi perekat komponen kabupaten, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Visi Jembrana disusun sebagai berikut :

Terwujudnya masyarakat Jembrana yang bahagia dan sejahtera, berkeadilan dan berbudaya yang dilandasi iman dan taqwa serta didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki semangat mekepong untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan tentang Visi Jembrana :

- Masyarakat yang bahagia dan sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik minimumnya serta kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat.
- Berkeadilan maksudnya masyarakat merasakan rasa adil dan persamaan kedudukan.
- Berbudaya maksudnya masyarakat yang memiliki totalitas wujud ide / gagasan, kompleks aktivitas / perilaku berpola serta hasil karya.
- Iman dan taqwa adalah kondisi mental spiritual di mana masyarakat mengikuti ajaran agamanya dan menjauhi laranganNYA.
- Semangat mekepong merupakan karakteristik masyarakat Jembrana untuk menjadi yang terbaik.

3.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Jembrana tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas untuk menunjang sektor pariwisata, industri dan perdagangan di samping sektor lainnya.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta memberdayakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik.
4. Mewujudkan Supermasi Hukum bagi setiap masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD. 1945 serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama yang toleran dan damai.
6. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan transparan serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

3.3 Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor - faktor penentu keberhasilan (FPK) berfungsi untuk memfokuskan strategi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, misi dan visi secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh FPK perlu adanya analisa Strength, Weaknesses, Oportunity, Threats (SWOT) dan Analisis Strategis / Pilihan (ASP) dengan metode analisa SWOT untuk ASP dengan cara sebagai berikut :

- Strategi SO dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O).

- Strategi WO dengan cara mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (O).
- Strategi ST dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk mencegah tantangan (T) dan
- Strategi WT dengan cara mengurangi kelemahan dengan mencegah tantangan (T).

ANALISA SWOT UNTUK ASP

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES/KELEMAHAN (W)
	1. Kontribusi Pertanian 2. Kebijakan Daerah 3. Kebudayaan Daerah	1. Kualitas SDM 2. Kualitas Produk Rendah 3. Terbatasnya Air
<u>OPORTUNITY (O) PELUANG</u> 1. Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan 2. PAD 3. Investasi	<u>STRATEGI SO</u> 1. Tingkatkan kontribusi Sektor Pertanian dalam struktur prekonomian dengan memanfaatkan peluang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi. 2. Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan Otonomi Daerah dimanfaatkan mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi. 3. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu tumbuh subur dengan adanya Otonomi Daerah sehingga terciptanya peluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	<u>STRATEGI WO</u> 1. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan melalui berlakunya Otonomi Daerah sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD. 2. Rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan melalui pemberlakuan Otonomi sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD. 3. Terbatasnya sumber daya air irigasi dioptimalkan pemanfaatannya dengan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan untuk membuka peluang berinvestasi sehingga pengembangan potensi pemungutan PAD semakin meningkat.
<u>THREATS/TANTANGAN (T)</u> 1. Pengaruh Sosial Politik, Ekonomi Nasional dan Global. 2. Arus Informasi Global 3. Membanjirnya Produk Luar	<u>STRATEGI ST</u> 1. Kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian Jembrana dapat mengantisipasi adanya pengaruh sosial politik, ekonomi, dan pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar. 2. Dengan adanya kebijakan dan peraturan daerah untuk mengantisipasi pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali, serta membanjirnya produk dari luar. 3. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu merupakan sarana untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik, ekonomi, pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar yang lebih mempunyai daya saing.	<u>STRATEGI WT</u> 1. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan untuk mengantisipasi dari pengaruh sosial politik ekonomi, arus informasi global dan membanjirnya produk dari luar. 2. Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan kualitasnya untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik dan ekonomi, pesatnya arus informasi global serta membanjirnya produk dari luar. 3. Terbatasnya sumber daya air irigasi yang pemanfaatannya dioptimalkan untuk mengantisipasi pengaruh arus informasi dan membanjirnya produk dari luar.

Selanjutnya untuk menentukan faktor penentu keberhasilan, dimulai dengan identifikasi indikator atau ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian dan sasaran yang ditetapkan. Faktor penentu keberhasilan ini merupakan hasil analisis dari asumsi yang ada

dipadukan dengan visi, misi dan tata nilai dengan memberikan bobot dan rating sebagaimana disajikan dalam lampiran 3.

Berdasarkan uraian dari lampiran 3, ada dua belas faktor penentu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan sebagai berikut :

1. Tingkatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian dengan memanfaatkan peluang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi.
2. Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan Otonomi Daerah dimanfaatkan mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi.
3. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu tumbuh subur dengan adanya Otonomi Daerah sehingga terciptanya peluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.
4. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan untuk mengantisipasi dari pengaruh sosial politik ekonomi, arus informasi global dan membanjirnya produk dari luar.
5. Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan kualitasnya untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik dan ekonomi, pesatnya arus informasi global serta membanjirnya produk dari luar.
6. Terbatasnya sumber daya irigasi yang pemanfaatannya dioptimalkan untuk mengantisipasi pengaruh arus informasi dan membanjirnya produk dari luar.
7. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan melalui berlakunya Otonomi Daerah sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.
8. Rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan melalui pemberlakuan Otonomi Daerah sehingga berpeluangnya berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.

9. Terbatasnya sumber daya air irigasi dioptimalkan pemanfaatannya dengan otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan untuk membuka peluang berinvestasi sehingga pengembangan potensi pemungutan PAD semakin meningkat.
10. Kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian Jembrana dapat mengantisipasi adanya pengaruh sosial politik, ekonomi, dan pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar.
11. Adanya kebijakan dan peraturan daerah untuk mengantisipasi pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali, serta membanjirnya produk dari luar.
12. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu merupakan sarana untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik, ekonomi, pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar yang lebih mempunyai daya saing.

Dari dua belas faktor penentu yang berpengaruh terhadap keberhasilan akan ditetapkan tiga faktor penentu keberhasilan sebagai skala prioritas yang merupakan faktor kunci keberhasilan (FKK).

Untuk mendapatkan FKK itu, maka faktor penentu keberhasilan dibandingkan dengan visi, misi dan tata nilai. Tata nilai yang berkembang dimasyarakat Jembrana pada umumnya :

1. Rasa kebersamaan dan gotong royong.
2. Kepedulian terhadap orang lain.
3. Berprilaku secara organisasional.
4. Berpikir santun dan rendah hati.
5. Semangat mekepong.

Hasil perpaduan analisa SWOT, analisis strategi dengan visi, misi dan tata nilai dapat dilihat pada lampiran 3.

Dari dua belas faktor penentu yang berpengaruh terhadap keberhasilan yang diuraikan diatas, ada 3 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang dapat dijadikan sebagai skala

prioritas yang merupakan Faktor Kunci Keberhasilan pada Pemerintah Kabupaten Jember yaitu :

1. Tingkatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian dengan memanfaatkan peluang Otonomi daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi.
2. Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan otonomi daerah dimanfaatkan mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi.
3. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan melalui berlakunya Otonomi Daerah sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Pengertian Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

4.2 Pengertian Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renstra Kabupaten Jembrana adalah :

Misi 1.

1. Tujuan :

Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan

Sasaran :

- Meningkatnya ketersediaan pangan.
- Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan kehutanan.

2. Tujuan :

Mengembangkan agribisnis, industri, perdagangan dengan mengoptimalkan sumber daya alam.

Sasaran :

- Meningkatnya komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang potensial
- Meningkatnya kegiatan perindustrian, perdagangan.

3. Tujuan :

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sasaran :

- Meningkatnya kemandirian koperasi dan PKM serta perdagangan yang sehat dan dinamis
- Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah serta antar Kota dan Desa.

4. Tujuan :

Meningkatkan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Sasaran :

- Meningkatnya kegiatan di berbagai sektor yang berwawasan lingkungan.

5. Tujuan :

Mengembangkan kepariwisataan yang berlandaskan budaya lokal.

Sasaran :

- Meningkatnya kunjungan wisata.

6. Tujuan :

Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien.

Sasaran :

- Terwujudnya pola penataan ruang yang terarah dan optimal.

Misi 2.

1. Tujuan :

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan masyarakat.

Sasaran :

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok petani dan kelompok masyarakat.

2. Tujuan :

Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran :

- Meningkatnya perluasan dan pemerataan mutu pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun melalui jalur luar sekolah.

3. Tujuan :

Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan.

Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

4. Tujuan :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai SDM yang berkualitas.

Sasaran :

- Meningkatnya mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat.

5. Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran :

- Terwujudnya peningkatan partisipasi sosial masyarakat, serta kesetiakawanan sosial masyarakat.

Misi 3.

1. Tujuan :

Meningkatkan sistim politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka serta menghormati keberagaman azas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran :

- Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Tujuan :

Memberdayakan peranan dan fungsi pengawasan oleh lembaga politik dan masyarakat.

Sasaran :

- Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan yang efektif oleh lembaga politik dan masyarakat.

Misi 4

1. Tujuan :

Meningkatkan kehidupan supremasi hukum dan hak azasi manusia.

Sasaran :

- Meningkatnya pelaksanaan supremasi hukum dan HAM di masyarakat.

Misi 5.

1. Tujuan :

Meningkatkan budaya masyarakat yang dilandasi Tri Hita Karana.

Sasaran :

- Meningkatnya pelaksanaan budi pekerti yang luhur di masyarakat.

2. Tujuan :

Meningkatkan kepribadian masyarakat yang dilandasi semangat mekepong.

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tradisional dan lembaga adat.

3. Tujuan :

- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan agama yang dianut.

Sasaran :

- Meningkatnya pengetahuan, pengahayatan dan pengamalan ajaran agama.

4. Tujuan :

Meningkatkan Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama yang dilandasi falsafah Pancasila.

Sasaran :

- Meningkatnya Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Misi 6.

1. Tujuan :

Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien.

Sasaran :

- Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- Meningkatnya pendapatan daerah.

2. Tujuan :

Meningkatkan aparatur yang akuntabel.

Sasaran :

- Terlaksananya pengawasan secara komprehensif.
- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) di setiap unit Eselon II.

3. Tujuan :

Meningkatkan pelayanan prima untuk masyarakat.

Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan yang mudah, bersahaja, terbuka dan adanya kepastian biaya dan waktu.

BAB V

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan

5.1. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Stretetik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima tahun selengkapny dapat dilihat pada format renstra terlampir.

5.2. Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

Program-program pemerintahan kabupaten Jembrana yang strategik dapat dilihat pada format renstra terlampir.

5.3. Kegiatan.

Kegiatan merupakan uraian yang terukur dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan - kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan strategik adalah kegiatan-kegiatan yang sangat esensial, dan terukur . Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dibahas dalam renstra dapat dilihat pada format renstra terlampir.

BAB VI

P E N U T U P

Perencanaan Strategik disusun berorientasi kepada kebutuhan daerah yang dapat digunakan dan sangat berguna bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jembrana. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk maju dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi visi dan misi Jembrana maka para pengelola dan pelaksana pembangunan yang strategis harus memahami betul tujuan dan sasaran renstra. Perencanaan Strategik ini disusun guna mengarahkan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam berbuat dan merencanakan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan ,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun..

Agar dapat dipahami maka renstra harus dikomunikasikan secara terus menerus kepada seluruh Sekretariat Daerah, Badan, Dinas dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga dapat melaksanakannya secara optimal.

Akhirnya meskipun renstra ini disusun secara cermat dengan melibatkan berbagai komponen, namun disadari renstra ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu saran dan perbaikan terus dilakukan.

Terima kasih.

Lampiran 1 : Proyeksi PDRB Jember Tahun 2001 - 2005 Atas Dasar Harga Konstan 93

NO.	KOMPONEN	2001	2002	2003	2004	2005	Jumlah Rata - rata 2001 - 2005
A.	<u>Sektor Primer</u>	143.788,83	147.875,56	152.718,58	156.052,02	161.375,85	761.810,83
1.	Pertanian	141.468,53	145.526,59	150.307,23	153.603,44	158.885,48	749.809,28
2.	Penggalian	2.302,30	2.348,97	2.411,35	2.448,58	2.490,37	12.001,55
B.	<u>Sektor Sekunder</u>	74.719,96	78.881,53	83.937,80	90.298,75	96.252,73	424.090,77
3.	Industri Pengolahan	38.301,83	40.915,70	43.978,36	47.836,84	51.426,10	222.458,82
4.	Listrik, Gas dan Air	3.924,37	4.151,66	4.478,21	4.717,99	4.918,48	22.190,71
5.	Bangunan / Konstruksi	32.493,76	3.814,17	35.481,23	37.743,92	39.908,15	179.441,24
C.	<u>Sektor Tersier</u>	304.740,21	319.513,91	337.473,62	350.863,23	364.963,43	1.667.562,39
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	105.853,27	110.838,39	116.778,04	119.562,24	123.646,77	576.678,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	80.580,35	84.453,50	89.219,80	91.970,96	95.941,43	442.166,03
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	24.069,45	25.346,97	26.697,05	28.069,06	28.826,01	133.008,54
9.	Jasa - jasa	94.233,14	98.875,05	104.778,73	111.260,97	116.549,22	525.709,11

Lampiran 2 : Analisa SWOT dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Faktor Ekternal.

Faktor - faktor	Bobot	Rating	Skoring (Bobot X Rating)	Komentar (Ranking)
<u>Strategi Internal</u>				
Kekuatan (Strength)				
1. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu.	11	3	33	III
2. Kontribusi sektor Pertanian dalam struktur perekonomian Jembrana.	15	4	60	I
3. Tersedianya sarana dan prasarana relatif merata	8	2	16	
4. Adanya keamanan yang kondusif di daerah.	8	4	32	
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah.	10	2	20	
6. Adanya Kebijakan dan Peraturan Daerah.	15	3	45	II
7. Kuantitas SDM yang memadai.	9	3	27	
8. Dukungan dan partisipasi masyarakat.	9	3	27	
9. Adanya keaneka ragaman hayati dan keindahan alam.	8	2	16	
10. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.	7	2	14	
<u>Kelemahan (Weaknessess)</u>				
1. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai.	14	4	56	I
2. Masih adanya penduduk miskin.	11	2	22	
3. Adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan.	10	2	20	
4. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.	8	2	16	
5. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan.	6	3	18	
6. Belum optimal kesadaran dan penegakan hukum.	12	3	36	
7. Kurang nya pemahaman terhadap Akuntabilitas Kinerja .	7	2	14	
8. Lemahnya Sistem Informasi Manajemen.	8	2	16	
9. Terbatasnya sumber daya air irigasi.	11	4	44	II
10. Masih rendahnya kualitas produk Daerah.	13	3	39	III
<u>Strategi Ekternal</u>				
Peluang (Opportunity)				
1. Berlakunya Undang - undang Nomor 22 / 1999 dan Undang - undang Nomor 25 / 1999.	18	4	72	I
2. Letak Geografis Jembrana Strategis.	14	2	28	
3. Kerjasama antar Daerah dan antar Negara.	13	3	39	
4. Adanya kontribusi dari bagian keuntungan BUMN dan BUMD.	10	2	20	
5. Pengembangan potensi pemungutan PAD.	17	4	68	II
6. Pemanfaatan teknologi yang berkembang.	12	2	24	
7. Terbukanya peluang berinvestasi.	16	3	48	III
<u>Tantangan (Threats)</u>				
1. Belum adanya konsistensi diantara produk - produk hukum Nasional yang ada.	14	3	42	
2. Adanya pengaruh sosial politik ekonomi Nasional dan global.	18	4	72	I
3. Pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali.	16	4	64	II
4. Stabilitas Nasional yang belum kondusif.	13	3	39	
5. Pengaruh Budaya Luar.	10	2	20	
6. Terjadinya kerusakan hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan	13	3	39	
7. Membanjirnya produk dari luar yang lebih mempunyai daya saing.	16	3	48	III

Lampiran 3 : Analisa SWOT dan ASP untuk FPK

STRATEGI	VISI	KETERKAITAN DENGAN										JML	RK	URUTAN FPK (Faktor Penentu Keberhasilan)		
		Misi (No)					Nilai - nilai									
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4				5	
STRATEGI SO																
1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam struktur prekonomian dengan memanfaatkan peluang dengan adanya Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi.	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4	37	I	1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam struktur prekonomian dengan memanfaatkan peluang dengan adanya Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan dalam upaya mendukung peningkatan PAD melalui peluang berinvestasi.	
2. Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan Otonomi Daerah mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi.	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	35	II	2. Dengan adanya kebijakan Pemerintah selaras dengan Otonomi Daerah mendukung pengembangan potensi pemungutan PAD melalui peluang berinvestasi.	
3. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu tumbuh subur dengan adanya Otonomi Daerah sehingga terciptanya peluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	4	2	2	3	2	4	2	4	3	2	2	3	33	IV	3. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan melalui berlakunya Otonomi Daerah sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	
STRATEGI WO																
1. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dapat dioptimalkan melalui berlakunya Otonomi Daerah sehingga berpeluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	4	2	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	34	III	4. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu tumbuh subur dengan adanya Otonomi Daerah sehingga terciptanya peluang berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	
2. Rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan melalui pemberlakuan Otonomi sehingga berpeluangnya berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	XI	5. Terbatasnya sumber daya air irigasi dioptimalkan pemanfaatannya dengan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan untuk membuka peluang berinvestasi sehingga pengembangan potensi pemungutan PAD semakin meningkat.	
3. Terbatasnya sumber daya air irigasi dioptimalkan pemanfaatannya dengan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan untuk membuka peluang berinvestasi sehingga pengembangan potensi pemungutan PAD semakin meningkat.	3	3	2	3	2	2	4	3	3	3	2	2	32	V	6. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik ekonomi, arus informasi global dan membanjirnya produk dari luar.	
STRATEGI ST																
1. Kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian dapat mengantisipasi adanya pengaruh sosial politik, ekonomi, dan pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar.	3	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	29	IX	7. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu merupakan sarana untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik, ekonomi, pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar yang lebih mempunyai daya saing.	
2. Adanya kebijakan dan peraturan daerah untuk mengantisipasi pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali, serta membanjirnya produk dari luar.	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	28	X	8. Terbatasnya sumber daya irigasi yang pemanfaatannya dioptimalkan untuk mengantisipasi pengaruh arus informasi dan membanjirnya produk dari luar.	
3. Kebudayaan daerah yang dijiwai Agama Hindu merupakan sarana untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik, ekonomi, pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar yang lebih mempunyai daya saing	3	2	2	2	2	4	3	3	3	2	3	2	30	VII	9. Kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian dapat mengantisipasi adanya pengaruh sosial politik, ekonomi, dan pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali serta membanjirnya produk dari luar.	
STRATEGI WT																
1. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai dioptimalkan untuk mengantisipasi dari pengaruh sosial politik ekonomi, arus informasi global dan membanjirnya produk dari luar.	4	2	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	32	VI	10. Adanya kebijakan dan peraturan daerah untuk mengantisipasi pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali, serta membanjirnya produk dari luar.	
2. Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan kualitasnya untuk mengantisipasi pengaruh sosial politik dan ekonomi, pesatnya arus informasi global serta membanjirnya produk dari luar.	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	XII	11. Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan melalui pemberlakuan Otonomi sehingga berpeluangnya berinvestasi untuk pengembangan potensi pemungutan PAD.	
3. Terbatasnya sumber daya irigasi yang pemanfaatannya dioptimalkan untuk mengantisipasi arus informasi dan membanjirnya produk dari luar.	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	30	VIII	12. Masih rendahnya kualitas produk daerah dioptimalkan dengan adanya pengaruh sosial politik dan ekonomi, pesatnya arus informasi global serta membanjirnya produk dari luar.	

PERENCANAAN STRATEGIK

INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN : 2001 - 2005

VISI 1	MISI 2	TUJUAN 3	SASARAN 4	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN 5	PROGRAM 6	KEGIATAN 7
Terwujudnya masyarakat Jembrana yang bahagia dan sejahtera berkeadilan dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa serta didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki semangat mekepong untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.	1. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas untuk menunjang sektor pariwisata, industri dan perdagangan disamping sektor lainnya.	1.1 Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.	1.1.1 Meningkatkan ketersediaan pangan.	1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan kelautan.	1.1.1.1.1 Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura.	1. Penyertaan modal produksi pertanian . 2. Pengembangan sentra produksi pertanian. 3. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi.
				1.1.1.2 Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan.	1. Pencegahan, pemberantasan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan. 2. Pengembangan kegiatan reproduksi ternak. 3. Pengembangan sentra produksi bibit unggul. 4. Pengembangan pakan ternak. 5. Pengembangan sarana dan prasaran produksi ternak.	
				1.1.1.3 Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.	1. Pengembangan dan operasional perikanan, tangkap dan budidaya. 2. Pengembangan dan peningkatan sarana / prasarana perikanan dan kelautan. 3. Pengembangan sentra produksi dan penyaluran sarana produksi. 4. Pengembangan dan peningkatan mutu hasil perikanan dan kalautan.	
			1.1.1.2 Meningkatkan pemeliharaan sumber daya air dan jaringan irigasi bagi pertanian .	1.1.1.2.1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.	1. Pembangunan prasarana jaringan irigasi. 2. Rehabilitasi Peningkatan prasarana dan sarana jaringan irigasi. 3. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.	
			1.1.2 Meningkatkan produksi komoditas perkebunan dan kehutanan.	1.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditas kehutanan dan perkebunan.	1.1.2.1.1 Peningkatan produksi komoditas kehutanan dan perkebunan.	1. Diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi komoditas kehutanan dan perkebunan. 2. Penguatan modal sarana dan prasarana kelompok perkebunan dan kehutanan. 3. Peningkatan produksi hutan rakyat, budidaya lebah, usaha sutra dan sarang burung walet.
				1.2 Mengembangkan, gribisnis, industri, perdagangan dengan mengoptimalkan sumber daya alam.	1.2.1 Meningkatkan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang potensial.	1.2.1.1 Mengembangkan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan unggulan spesifik melalui agribisnis.
		1.2.2 Meningkatkan kegiatan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran	1.2.2.1 Mengembangkan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran		1.2.2.1.1 Pembinaan dan pengembangan industri.	1. Penyertaan modal dan sarana produksi industri kecil dan menengah. 2. Pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah. 3. Pembinaan pelayanan jasa (klinik GKM).

VISI 1	MISI 2	TUJUAN 3	SASARAN 4	Kebijakan	Program	Kegiatan				
				5	6	7				
		1.3 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.	1.3.1 Meningkatnya kemandirian koperasi dan PKM serta perdagangan yang sehat dan dinamis.	1.3.1.1 Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta kelompok tani, koperasi dan PKM di berbagai sektor usaha.	1.3.1.1.1 Pengembangan Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi dan PKM	1. Penguatan modal koperasi dan PKM. 2. Pemberdayaan administrasi dan koperasi dan PKM. 3. Temu usaha kemitraan kelompok tani, koperasi dan PKM. 4. Pengembangan sentra usaha kecil menengah dan koperasi				
				1.3.1.2 Pengembangan kewirausahaan dan pedagang menengah dan kecil.	1.3.1.2.1 Perkuatan akses pasar.	1. Pengembangan pusat informasi produksi. 2. Pengembangan produksi produk daerah.				
					1.3.1.2.2 Peningkatan daya saing ekspor.	1. Pengembangan desain produk. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.				
			1.3.2 Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah serta antar kota dan desa.	1.3.2.1 Meningkatkan pemerataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antar kecamatan, antar pedesaan dan perkotaan .	1.5.1.2.1 Pemeliharaan dan peningkatan prasarana transportasi darat.	1. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. 2. Pemeliharaan berkala jalan Kabupaten. 3. Peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten. 4. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan.				
						1.4 Meningkatkan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.	1.4.1 Meningkatnya kegiatan di berbagai sektor yang berwawasan lingkungan.	1.4.1.1 Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan konservasi, rehabilitasi dengan teknologi ramah lingkungan.	1.4.1.1.1 Konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1. Pengelolaan keaneka ragam hayati hutan, pertanian, air, kelautan dan wilayah pesisir yang ramah lingkungan. 2. Pengembangan keaneka ragam kegiatan budidaya pertanian, kehutanan dan kelautan.. 3. Pengelolaan hutan produksi. 4. Penyelenggaraan rehabilitasi lahan didalam dan luar kawasan hutan.
									1.4.1.1.2 Pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.	1. Pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya air, hutan dan industri. 2. Pengembangan teknologi pengolahan limbah.
		1.4.1.1.3 Perlindungan dan pengamanan hutan.	1. Pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan fungsi hutan sesuai penetapannya. 2. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan. 3. Penertiban terhadap pelanggaran pengelolaan hutan.							
		1.5. Mengembangkan kepariwisataan yang berlandaskan budaya lokal.	1.5.1 Meningkatnya kunjungan wisata.	1.5.1.1 Mengembangkan pembangunan kepariwisataan.	1.5.1.1.1 Pengembangan diversifikasi objek dan atraksi wisata.	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas objek, daya tarik dan atraksi wisata. 2. Mengidentifikasi objek dan atraksi wisata.				
					1.5.1.1.2 Meningkatkan promosi serta pelayanan pariwisata.	1. Meningkatkan fasilitas kepariwisataan. 2. Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan pada masyarakat.				
		1.6 Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien.	1.6.1 Terwujudnya pola penataan ruang yang terarah dan optimal.	1.6.1.1 Mengkaji ulang RTR.	1.6.1.1.1 Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi RTR.	1. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Penyusunan dan review RTR.				
					1.6.1.2 Peningkatan penataan penggunaan pertanahan .	1.6.1.2.1 Memantapkan penertiban administrasi pertanahan. 2. Pendataan tentang kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. 3. Sertifikasi tanah Negara dan milik umum.				

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
				KEBLAJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
	2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	2.1 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan masyarakat.	2.1.1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok petani dan kelompok masyarakat.	2.1.1.1	2.1.1.1.1. Peningkatan kapasitas / kemampuan petani dan masyarakat.	1. Kursus / pelatihan kelompok tani, wanita tani dan kelompok masyarakat yang formal maupun informal. 2. Pelaksanaan temu karya, magang dan studi banding. 3. Pelaksanaan lomba kelompok tani berbagai komodite pertanian.	
				2.2.1.1	2.2.1.1.1. Perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.	1. Pengembangan TPA (Tempat Penitipan Anak). 2. Pemberdayaan Taman Kanak - kanak. 3. Pendirian USB (unit sekolah Baru) SLTP. 4. Pembukaan jurusan baru pada SMK. 5. Akreditasi sekolah swasta. 6. Sertifikasi Pendidikan Luar Sekolah	
				2.2.1.2	2.2.1.1.2	2.2.1.1.2. Pendidikan Luar Sekolah.	1. Pemberdayaan kelompok belajar paket. 2. Pemberdayaan kelompok bina usaha Dikmas.
						2.2.1.2.1	2.2.1.2.1. Sertifikasi guru.
				2.2.1.3	2.2.1.3.1	2.2.1.3.1. Regrouping (penggabungan sekolah).	1. Sosialisasi tata cara penggabungan. 2. Pelaksanaan penggabungan SD.
				2.2.1.4	2.2.1.4.1	2.2.1.4.1. Peningkatan relevansi lulusan pendidikan.	1. Sosialisasi Pendidikan sistim Ganda (PSG). 2. Pelaksanaan PSG. 3. Pelaksanaan muatan lokal (MULOK).
				2.2.1.5	2.2.1.5.1	2.2.1.5.1. Pembinaan generasi muda dan olah raga.	1. Pemberdayaan pemuda dan atlit berprestasi. 2. Bimbingan dan pelatihan karang taruna. 3. Bimbingan dan pelatihan pemuda pengangguran.
		2.3. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan.	2.3.1 Meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.	2.4.1.1.	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1. Peningkatan ketrampilan manajemen tenaga kerja.	1. Pelatihan ketrampilan pemuda dan UKM. 2. Pemagangan dan pengerahan jasa tenaga kerja Indonesia. 3. Pembentukan Bursa Kerja Kabupaten (BKK).
					2.3.1.1.2	2.3.1.1.2. Pemantauan hubungan industrial Pancasila.	1. Sosialisasi Hubungan Industrial Pancasila. 2. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
					2.3.1.1.3	2.3.1.1.3. Pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang kependudukan dan Ketenagakerjaan.	1. Sosialisasi administrasi kependudukan. 2. Pelayanan administrasi kependudukan. 3. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang Ketenagakerjaan.
		2.4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai SDM yang berkualitas.	2.4.1 Meningkatkan mutu pelayanan dan upaya kesehatan masyarakat.	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.	1. Melaksanakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang. 3. Pengembangan pengobatan tradisonal. 4. Gerakan sayang ibu.	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBLAJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				2.4.1.2 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit.	2.4.1.2.1 Pemberantasan dan pencegahan penyakit.	1. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. 2. Pelaksanaan imunisasi. 3. Pengembangan surveillance epid. 4. Pengawasan dan pengendalian kesehatan kepada pekerja fasilitas umum dan hiburan
				2.4.1.3 Peningkatan status gizi masyarakat.	2.4.1.3.1 Perbaiki gizi.	1. Penyuluhan gizi masyarakat dan institusi. 2. Penanggulangan Gaky (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) dan gizi salah. 3. Pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).
				2.4.1.4 Peningkatan kualitas lingkungan.	2.4.1.4.1 Peningkatan kesehatan lingkungan.	1. Penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat - tempat umum. 2. Pengawasan kualitas air dan tempat pengolahan makanan.
				2.4.1.5 Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya pembiayaan kesehatan.	2.4.1.5.1 Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.	1. Sosialisasi Dana Sehat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). 2. Pemberdayaan badan pelaksana JPKM. 3. Pengembangan dana sehat. 4. Penyuluhan PHBS, HIV / AIDS dan Narkoba.
				2.4.1.6 Peningkatan sumber daya kesehatan.	2.4.1.6.1 Meningkatkan manajemen kesehatan, POM dan bahan berbahaya.	1. Pengadaan obat / pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya. 2. Peningkatan manajemen kesehatan dan hukum. 3. Peningkatan sarana kesehatan.
		2.5 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	2.5.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi sosial masyarakat, serta kesetiakawanan sosial masyarakat.	2.5.1.1 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat.	2.5.1.1.1 Pengembangan potensi kesejahteraan sosial.	1. Penyuluhan dan bimbingan sosial kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial, organisasi sosial dan panti asuhan.
				2.5.1.2 Peningkatan kewspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana.	2.5.1.2.1 Penanggulangan bencana alam dan pengungsi.	1. Sosialisasi tentang bencana kepada masyarakat. 2. Pemetakan daerah rawan bencana. 3. Menyelenggarakan kegiatan Gladi Posko Penanggulangan Bencana.
				2.5.1.3 Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	2.5.1.3.1 Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial.	1. Bimbingan dan pelatihan ketrampilan serta pemberian bantuan kepada penyandang masalah sosial.
					2.5.1.3.2 Pelayanan dan rehabilitasi sosial.	1. Bimbingan mental dan pelatihan ketrampilan serta pemberian bantuan kepada penyandang cacat, tuna sosial, anak nakal dan korban narkoba. 2. Pengawasan, penertiban dan pemulangan WTS, Gepeng, Orang Terlantar. 3. Pengawasan penertiban dan pemulangan orang gila ke Rumah Sakit Jiwa.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	3. Mewujudkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberdayakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik.	3.1 Meningkatkan sistim politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka serta menghormati keberagaman azas.	3.1.1 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	3.1.1.1 Mengembangkan sistem politik.	3.1.1.1.1 Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan kemandirian parpol / ormas / LSM.	1. Sosialisasi paket Undang - undang bidang politik. 2. Pemberdayaan forum komunikasi dan konsultasi. 3. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
		3.2 Memberdayakan peranan dan fungsi pengawasan oleh lembaga politik dan masyarakat.	3.2.1 Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan yang efektif oleh lembaga politik dan masyarakat.	3.2.1.1 Mengurangi dominasi pemerintah dalam dinamika kehidupan politik dan kemasyarakatan, meletakkan fungsi pemerintah lebih sebagai komunikator, fasilitator dan mediator.	3.2.1.1.1 Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, lembaga politik dan masyarakat.	1. Optimalisasi peran dan fungsi pengurus parpol, ormas dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 2. Optimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD.
	4. Mewujudkan supremasi hukum bagi setiap masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi hak azasi manusia.	4.1 Meningkatkan pelaksanaan supremasi hukum dan hak azasi manusia.	4.1.1 Meningkatnya supremasi hukum dan HAM di masyarakat.	4.1.1.1 Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan supremasi hukum dan HAM.	4.1.1.1.1 Penegakan supremasi hukum dan HAM	1. Sosialisasi peraturan, perundang - undangan dan HAM. 2. Pembuatan dan penyempurnaan Perda.
					4.1.1.1.2 Penataan dan pengembangan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum.	1. Penataran Bendesa Adat dan penyusunan Awig - awig. 2. Penyuratan Awig - awig Desa Adat. 3. Pembinaan Desa Adat. 4. Menyebarkan buku - buku himpunan peraturan perundang - undangan.
	5. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama yang toleran dan damai.	5.1 Meningkatkan budaya masyarakat yang dilandasi Tri Hita Karana.	5.1.1 Meningkatnya pelaksanaan budi pakerti yang luhur di masyarakat.	5.1.1.1 Penyempurnaan kurikulum budi pekerti di semua tingkat pendidikan.	5.1.1.1.1 Pengembangan budi pakerti melalui jalur sekolah dan luar sekolah.	1. Pengadaan buku - buku tentang budi pakerti. 2. Pembekalan pamong belajar.
		5.2 Meningkatkan kepribadian masyarakat yang dilandasi semangat mekeprung.	5.2.1 Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tradisional dan lembaga adat.	5.2.1.1.1 Meningkatkan pemberdayaan lembaga tradisional.	5.2.1.1.1 Peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat.	1. Pembekalan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat. 2. Pembekalan kelompok pesantian, pengajian dan keagamaan lainnya.
		5.3 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan agama yang dianut.	5.3.1 Meningkatnya pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.	5.3.1.1 Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	5.3.1.1.1 Peningkatan pelayanan kehidupan beragama.	1. Pelaksanaan Dharma Wecana / Khotbah pada upacara keagamaan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan umat beragama.

VISI 1	MISI 2	TUJUAN 3	SASARAN 4	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
				KEBIJAKAN 5	PROGRAM 6	KEGIATAN 7	
		5.4. Meningkatkan Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama yang dilandasi falsafah Pancasila.	5.4.1. Meningkatnya Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama.	5.4.1.1. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.	5.4.1.1.1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama.	1. Mengefektifkan forum komunikasi antar umat beragama. 2. Peningkatan simekrama, silaturahmi antar dan inter umat beragama.	
	6. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien dan transparan serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.	6.1. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien.	6.1.1. Terwujudnya kelembagaan Pemkab. sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.	6.1.1.1. Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan Kabupaten.	6.1.1.1.1. Penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten.	1. Pelaksanaan analisis jabatan. 2. Penyusunan Perda Kelembagaan.	
				6.1.1.1.2. Peningkatan kualitas SDM.	1. Pelaksanaan Diklat Penjurangan dan fungsional. 2. Pendidikan S1 dan S2. 3. Kursus - kursus teknis fungsional. 4. Seminar, loka karya, penataran.		
				6.1.1.1.3. Peningkatan sarana dan prasarana.	1. Penataan aset - aset daerah. 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.		
			6.1.2. Meningkatnya pendapatan daerah.	6.1.2.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. (PAD).	6.1.2.1.1. Peningkatan Pendapatan Daerah	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 2. Penyempurnaan sistem pemungutan PAD.	
		6.2. Meningkatkan aparatur yang akuntabel.	6.2.1. Terlaksananya pengawasan secara komprehensif.	6.2.1.1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	6.2.1.1.1. Peningkatan pengawasan.	6.2.1.1.1.1. Peningkatan pengawasan.	1. Penyediaan media pengaduan. 2. Pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur. 3. Pengawasan bidang pembangunan. 4. Pengawasan bidang keuangan dan BUMD. 5. Pengawasan bidang kesejahteraan sosial. 6. Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat. 7. Gerakan Disiplin Nasional dilingkungan Pemkab. Jembrana.
							6.2.2. Tersusunnya Renstra dan Lakip di setiap eselon II keatas
	6.3. Meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi pelayanan prima.	6.3.1. Meningkatnya pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu.	6.3.1.1. Pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.	6.3.1.1.1. Peningkatan pelayanan umum.	1. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan. 2. Percepatan penyelesaian administrasi. 3. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.		

File : Bappeda/Mang Mas